

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-PARKING* SEBAGAI
WUJUD *SMART CITY* DI KOTA SAMARINDA
(STUDI KASUS JALAN PANGLIMA BATUR)**

Rana Kapuangan Putri, Enos Paselle

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 4, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Efektivitas Penerapan *E-Parking* Sebagai Wujud *Smart City* di Kota Samarinda (Studi Kasus Jalan Panglima Batur).

Pengarang : Rana Kapuangan Putri

NIM : 2002016077

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 30 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. Enos Paselle, M.AP
NIP 19740524 200501 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 4
Tahun	: 2025
Halaman	: 1192-1199

EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-PARKING* SEBAGAI WUJUD *SMART CITY* DI KOTA SAMARINDA (STUDI KASUS JALAN PANGLIMA BATUR)

Rana Kapuangan Putri ¹, Enos Paselle ²

Abstrak

Kota Samarinda merupakan Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, mengalami pertumbuhan dan kendaraan yang signifikan. Untuk mengatasi kemacetan serta meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan mengimplementasikan Parkir Elektronik (E-Parking) sebuah sistem pembayaran parkir non-tunai berbasis teknologi informasi yang diharapkan menjadi salah satu komponen smart city. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan E-Parking di Kawasan jalan Panglima Batur belum berjalan dengan efektif. Masih terdapat faktor-faktor penghambat dan beberapa kendala, masyarakat kurangnya pemahaman tentang sistem parkir elektronik, dan masih banyak masyarakat masih menggunakan cash Selanjutnya, masalah kelistrikan dan juga alat EDC yang terkadang error juga merupakan faktor penghambat yang dapat memengaruhi kinerja sistem parkir elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas penerapan E-Parking di Kota Samarinda dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan parkir elektronik tersebut. Meskipun demikian ketepatan sasaran sudah tepat dimana sasarannya masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Juru Parkir. Adapun pemantauan program sudah efektif yang diikuti pendampingan dan evaluasi perbaikan telah rutin dilaksanakan.

Kata Kunci : *efektivitas, parkir elektronik, smart city, Kota Samarinda*

Pendahuluan

Pemerintah daerah mengumpulkan dan mengelola biaya layanan parkir sebagai salah satu jenis pajak. Parkir merupakan bagian integral dari pengalaman perjalanan masyarakat dan sistem transportasi secara keseluruhan. Dengan semakin banyak orang mengemudi dan semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, pasti akan ada peningkatan atau penurunan jumlah tempat parkir yang tersedia di kota-kota. Karena itu, manajemen parkir memiliki potensi menjadi industri yang menjanjikan dan menguntungkan, karena parkir merupakan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ranakapuangan07@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

kebutuhan mutlak bagi setiap pemilik mobil. Meskipun demikian, ada sejumlah masalah yang melanda industri parkir, termasuk harga yang tidak sesuai dengan hukum, kerusakan atau pencurian mobil, persaingan tidak sehat antar bisnis, dan hilangnya pendapatan yang diderita pemerintah daerah akibat kebocoran retribusi. Keberadaan petugas parkir tanpa izin, yang sering dikenal sebagai petugas parkir ilegal, memperburuk masalah manajemen parkir yang buruk.

Menyusul implementasi skema E-Parking, Pemerintah Kota Samarinda menanggapi kekhawatiran ini sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022, yang berkaitan dengan Manajemen Parkir Tanpa Tunai. Semua area parkir, termasuk parkir umum di pinggir jalan, diwajibkan oleh peraturan ini untuk menerapkan sistem transaksi tanpa tunai. Kartu uang elektronik, QRIS, dan aplikasi pembayaran digital lainnya digunakan oleh E-Parking, sebuah sistem manajemen parkir berbasis elektronik. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membuat pembayaran parkir lebih sederhana bagi masyarakat umum, meningkatkan transparansi, mengurangi kebocoran pungutan, dan menghentikan pungutan ilegal. Sebagai bagian dari upayanya untuk mewujudkan ide kota pintar di sektor transportasi, Pemerintah Kota Samarinda juga telah menerapkan E-Parking. Untuk memfasilitasi penerimaan pembayaran non-tunai, sistem ini menggunakan aplikasi elektronik dan perangkat EDC. Namun demikian, sistem E-Parking Kota Samarinda masih dalam tahap pengembangan awal. Masih banyak masalah, seperti kurangnya tempat parkir dibandingkan dengan jumlah mobil, komunitas dengan tingkat literasi teknologi yang rendah, orang-orang yang kurang disiplin untuk menggunakan alternatif selain uang tunai, perangkat EDC di tempat parkir yang sering salah sehingga orang tetap menggunakan uang tunai, dan orang-orang yang tidak jujur yang mencoba mengakali sistem. Selain itu, kinerja E-Parking masih di bawah standar dalam hal menghasilkan Pendapatan Asli Regional (PAD).

Ketertiban parkir, aksesibilitas, peningkatan pungutan lokal, efisiensi waktu pelayanan, dan kepuasan pengguna adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi kinerja program terkait penerapan e-Parking. Studi semacam ini sangat penting bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk mengetahui apakah rencana mereka untuk mengadopsi e-Parking di Jalan Panglima Batur sejalan dengan visi mereka tentang kota pintar.

Kerangka Dasar Teori

Pelayanan Publik

Mempermudah pelaksanaan suatu tindakan pelayanan oleh orang lain adalah esensi dari pelayanan. Seseorang tidak dapat memiliki eksistensi manusia tanpa melayani orang lain, sebagaimana ditekankan oleh Sinambela (2010). Pelayanan didefinisikan oleh Moenir (2006) sebagai terpenuhinya kebutuhan seseorang melalui tindakan orang lain. Segala upaya yang dilakukan oleh orang, kelompok, atau lembaga untuk memenuhi suatu kebutuhan dianggap sebagai

pelayanan, menurut Pasolong (2007). Tiga elemen dasar pelayanan, sebagaimana diuraikan oleh Syafiie (2003), adalah:

1. Relatif terjangkau,
2. Waktu pelayanan yang cepat, dan
3. Standar pelayanan yang memadai.

Efektivitas

Menurut Handayani (2006), tingkat pencapaian dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan salah satu ukuran efektivitas. Dengan demikian, efektivitas suatu program didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaannya. Jika Anda ingin mengetahui seberapa sukses suatu program dan aspek apa saja yang memengaruhi pelaksanaannya, Anda harus melihat apa yang disarankan Budiani (2007):

1. Penetapan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program.
3. Tujuan Program
4. Pengawasan Program.

E-government

Menurut AS (2013), "e-government" mengacu pada transformasi operasi pemerintah melalui penggunaan teknologi digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas penyampaian layanan publik sekaligus meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Bank Dunia (2002) memberikan definisi yang lebih jelas tentang e-government sebagai proses transformasi pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan bertanggung jawab. Ada harapan bahwa negara dapat mengumpulkan lebih banyak uang pajak berkat inisiatif e-government yang meningkatkan tata kelola, mengurangi korupsi, membuat lembaga pemerintah lebih transparan dan akuntabel kepada publik, meningkatkan kepuasan layanan, dan memangkas biaya operasional.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan atau organisasi dan membantu menyelesaikan berbagai hal dengan menggunakan keahlian, pengalaman, dan pengetahuan mereka. Efektivitas dan keberlanjutan kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia (SDM) seringkali mencakup semua tingkatan personel, dari pekerja tingkat pemula hingga manajemen puncak, yang tidak hanya menjalankan tugas tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan organisasi melalui ide, inovasi, dan kreativitas mereka. Manajemen sumber daya manusia, menurut Simamora (2004), adalah praktik menciptakan dan menjalankan sistem untuk mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Sistem ini mencakup topik-topik seperti hubungan kerja, evaluasi kinerja, manajemen kompetensi, manajemen karier, pelatihan dan pengembangan, serta perekrutan dan seleksi.

E-Parking

Salah satu perkembangan baru dalam layanan parkir di jalan adalah parkir elektronik, yang memungkinkan pelanggan untuk memarkir kendaraan mereka tanpa menggunakan uang tunai. Selain sebagai langkah penting menuju terciptanya kota pintar, pengenalan izin parkir elektronik menunjukkan keinginan pemerintah untuk meningkatkan layanan publik dengan menggunakan teknologi informasi (Artamalia & Prabawati, 2019). Dengan sistem ini, tempat parkir menjadi lebih terorganisir, dan pengemudi serta penumpang akan merasa lebih aman dan nyaman. Mobilitas sehari-hari pengguna juga ditingkatkan dengan adanya parkir elektronik. Karena biaya dihitung secara bertahap sesuai dengan periode penggunaan parkir, sistem pembayaran berbasis elektronik memiliki peluang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan pungutan.

Smart City

Seiring dengan semakin luasnya penggunaan dan pengakuan resmi teknologi e-government dalam administrasi publik, gagasan tentang "kota pintar" pun berkembang. Menurut gagasan ini, kota pintar hanyalah langkah logis selanjutnya dalam pengembangan tata kelola elektronik. Menurut Prat (2014), kota pintar didefinisikan sebagai wilayah perkotaan yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai sistem dengan lebih baik melalui penggunaan solusi berbasis teknologi dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan. Gagasan tentang "kota pintar" baru-baru ini menjadi viral sebagai perspektif baru dalam desain kota, berkat kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Definisi Konsepsional

Kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan parkir berbasis teknologi digital guna meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan publik sekaligus mengikuti tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, digambarkan sebagai efektivitas implementasi e-parking dalam mendukung kota cerdas dalam penelitian ini. Beberapa indikator digunakan untuk mengukur efektivitas program. Kejelasan tujuan, tingkat sosialisasi program, aktivitas pemantauan program, dan akurasi tujuan adalah beberapa penanda tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian dalam studi ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas parkir elektronik di Kota Samarinda yang berkaitan dengan inisiatif kota pintar. Masyarakat, Kepala Divisi Lalu Lintas Badan Transportasi Kota Samarinda, Kepala Seksi Parkir Badan Transportasi Kota Samarinda, Petugas Parkir di Jalan Panglima Batur, dan informan kunci lainnya diwawancarai untuk penelitian ini, yang mengandalkan data primer yang dikumpulkan melalui observasi. Buku, dokumen peraturan, dan artikel atau berita tentang efektivitas sistem parkir elektronik dalam manajemen parkir Kota Samarinda menyediakan data sekunder.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas Penerapan E-Parking sebagai wujud Smart City di Jalan Panglima Batur Kota Samarinda

Layanan parkir elektronik di Kota Samarinda berpotensi meningkatkan manajemen parkir, menurut beberapa penelitian. Dipercaya bahwa efisiensi operasional, pengalaman pengguna, dan manajemen parkir secara keseluruhan akan meningkat dengan penggunaan teknologi mutakhir ini. Meskipun demikian, sejumlah faktor harus diperhatikan untuk mendapatkan efektivitas maksimal. Dengan menggunakan pendekatan Budiani (2007:53), penulis penelitian ini mengevaluasi sistem parkir elektronik Kota Samarinda (sebuah inisiatif Kota Pintar).

1. Ketepatan Sasaran Program

Salah satu cara untuk melihat sistem parkir elektronik Kota Samarinda adalah sebagai implementasi praktis dari gagasan program tentang indikator akurasi target. Tingkat keberhasilan peserta program dalam mencapai tujuan mereka sangat mendasar bagi gagasan ini. Selain itu, studi tersebut menemukan bahwa parkir elektronik telah berhasil mengurangi pemerasan parkir oleh petugas, yang merupakan cerminan dari hasil akurasi program yang lebih baik, yang mencakup peningkatan pendapatan daerah dan layanan publik yang lebih baik. Karena tidak setiap daerah telah mampu menerapkan sistem parkir elektronik, masih ada kendala yang harus diatasi sebelum program dapat mencapai tujuan utamanya yaitu parkir yang akurat.

2. Sosialisasi Program

Kemampuan administrator program untuk mengkomunikasikan detail program kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas dikenal sebagai sosialisasi program. Studi penulis tentang sosialisasi program memberikan bukti bahwa Dinas Transportasi Kota Samarinda menggunakan banyak saluran, termasuk media sosial dan papan reklame, untuk menyebarkan informasi tentang inisiatif E-Parking. Untuk lebih mengingatkan masyarakat tentang perubahan yang akan datang, spanduk juga ditempatkan di seluruh area e-parking. E-Parking, yang telah sepenuhnya diimplementasikan di semua mal dan rumah sakit Kota Samarinda, telah diluncurkan oleh Dinas Transportasi Kota Samarinda sebagai bagian dari strategi baru.

3. Tujuan Program

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda adalah target yang dituju dari inisiatif e-parking, menunjukkan bahwa program ini mungkin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Ini membuktikan bahwa inisiatif tersebut berhasil dalam tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, penegakan peraturan parkir di Kota Samarinda mungkin mendapat manfaat dari e-parking. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk membuat operasi tempat parkir lebih terorganisir dan mengurangi kemungkinan konfrontasi antara

pengemudi dan petugas parkir. Berikut rincian pendapatan e-parking Kota Samarinda:

Tabel 1. Pendapatan Retribusi *E-Parking* di kota Samarinda

NO	Tahun	Pendapatan Retribusi <i>E-Parking</i>
1.	2021	Rp. 1.065.852.786
2.	2022	Rp. 1.116.314.428.
3.	2023	Rp. 1.243.692.272.

4. Pemantauan Program

Area parkir di Samarinda dilengkapi sistem pengawasan CCTV sebagai bagian dari program pemantauan badan transportasi kota. Petugas parkir dapat mengawasi pembayaran tunai pelanggan dan masalah keamanan apa pun dengan menggunakan pengawasan CCTV ini.

Gambar 1. Pemantauan melalui CCTV pada sejumlah titik di Kota Samarinda



Sumber: Samarinda Pos, 2025

Terlihat jelas dari Gambar 1 bahwa keberhasilan dalam mengatur parkir ilegal di Kota Samarinda menggunakan sistem pengeras suara yang terhubung dengan kamera CCTV masih minim. Petugas di lapangan tidak selalu diharuskan melakukan pengawasan karena arsitektur sistem ini. Pengemudi yang parkir sembarangan atau melanggar peraturan dapat langsung ditegur dari ruang kendali. Menurut studi yang meneliti seberapa baik program pemantauan tersebut berjalan, petugas parkir juga dapat memperoleh manfaat dari pemantauan karena membantu mereka mengoperasikan peralatan bahkan ketika mereka menghadapi hambatan.

Untuk memastikan inisiatif ini mencapai potensi penuhnya, Dinas Transportasi Kota Samarinda juga menilai dan memperbaiki setiap tantangan yang dihadapi. Dinas Transportasi Kota Samarinda tidak hanya menggunakan CCTV untuk pemantauan; mereka juga melatih polisi parkir untuk mengawasi situasi di lapangan.

Faktor Penghambat Penerapan E-Parking sebagai wujud Smart City di Jalan Panglima Batur Kota Samarinda

Terdapat beberapa masalah yang terus berlanjut terkait implementasi kebijakan E-Parking oleh Departemen Perhubungan di Kota Samarinda. Kebijakan ini seharusnya membuat parkir di kota lebih terorganisir dan rapi, mengurangi perilaku buruk petugas parkir yang sering meminta tarif berbeda, dan tujuan lainnya. Masalah umum dalam penerapan kebijakan E-Parking adalah kurangnya pemahaman masyarakat umum terhadap sistem tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Departemen Perhubungan harus melakukan edukasi pengguna secara luas mengenai hal tersebut.

Semua orang, mulai dari petugas parkir hingga pengguna parkir itu sendiri, tunduk pada peraturan parkir Kota Samarinda, yang mencakup segala hal mulai dari biaya hingga penggunaan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem parkir Samarinda lebih terstruktur dan terorganisir. Tujuan dari saran ini adalah untuk menjadikan Samarinda sebagai kota pintar dengan membuat pengguna layanan seperti kita lebih selektif dan dengan membantu petugas parkir seperti memahami peran kita dalam menjalankan program E-Parking dan signifikansinya.

Penutup

Kesimpulan

Temuan-temuan berikut diperoleh dari studi dan debat yang dilakukan mengenai efektivitas penerapan parkir elektronik sebagai wujud *smart city* di Kota Samarinda:

1. Meskipun sistem *E-Parking* Kota Samarinda telah diterapkan sejak tahun 2021, sistem ini belum menunjukkan keberhasilan yang diharapkan. Petugas parkir masih harus menoleransi pelanggan yang membayar tunai karena banyak dari mereka masih belum memahami sistem pembayaran tanpa uang tunai.
2. Pengelolaan layanan *E-Parking* melibatkan sejumlah kendala yang mengurangi efisiensi sistem. Masalah muncul ketika orang tetap melanggar aturan, tidak sepenuhnya memahami cara kerja parkir elektronik, dan masih memilih untuk membayar dengan uang tunai. Bersamaan dengan masalah-masalah sosial ini, sistem *E-parking* menghadapi tantangan teknologi termasuk kekurangan daya dan kerusakan perangkat EDC.

Saran

Untuk menjadikan Kota Samarinda sebagai Kota Pintar, penulis mengajukan sejumlah usulan dan komentar tentang efektivitas penerapan parkir elektronik:

1. Perluas jangkauan dan edukasi lebih banyak orang. Pemerintah Kota Samarinda dan Dinas Perhubungan harus meningkatkan upaya mereka untuk menginformasikan masyarakat tentang sistem E-Parking dan cara menggunakannya.

2. Petugas parkir membutuhkan arahan dan pengawasan yang lebih baik. Sistem pemantauan dan evaluasi kinerja petugas parkir yang lebih terorganisir harus diterapkan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Samarinda. Kepatuhan terhadap pedoman penggunaan perangkat *E-Parking*, kualitas layanan, dan disiplin merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan.
3. Manfaatkan keandalan jaringan, perangkat EDC, dan sistem pemantauan yang bergantung pada teknologi secara maksimal. Mengingat gangguan jaringan merupakan tantangan signifikan bagi transaksi tanpa uang tunai yang menggunakan perangkat EDC, sangat penting bagi Pemerintah Kota Samarinda, melalui Dinas Perhubungan, untuk menjamin bahwa setiap tempat *E-Parking* memiliki koneksi internet yang konsisten.

Daftar Pustaka

- Sinambela, L. P., dkk. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moenir, H. A. S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handayani, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Budiani, N. W. (2007). *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Jurnal ekonomi dan sosial input*, 2(1), 49-57.
- World Bank. (2002). *The World Bank Annual Report 2002: Volume 1. Main Report*. Washington, DC: World Bank.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi ketiga. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Artamalia, D. E., & Prabawati, I. (2019). Evaluasi Program E-Parking Di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya. *Publika*, 7(3), 1–8.
- Pratt, C. W., Gill, K. J., Barrett, N. M., & Roberts, M. M. (2014). *Psychiatric Rehabilitation*. Academic Press.